

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.V Dicey. 2008. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Bandung. Nusamedia.
- Ajarotni Nasution dkk. 2008. *Tesaurus Bidang Hukum*. Jakarta. Pengayoman.
- Anwar, Yesmil Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung. Widya Padjajaran.
- Asshiddiqie, Jimmly & Ali, Syafa'at M. 2016. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta. Setjen & Kepaniteraan MK•RI.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung. Mandar Maju.
- C.S.T. Kansil. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Chairul Huda. 2006. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada TiadaPertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta. Kencana Prenada Media.
- Dardji Darmodiharjo dan Shidarta. 2004. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung. Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.

- Erdianto Efendi. 2012. *Hukum Pidana Dalam Dinamika*. Pekanbaru. UR Press.
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Frans Magnis Suseno. 2009. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_. 1988. *Kuasa dan Moral*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Edy Yunara. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Elwi Danil. 2012. *Korupsi, Konsep, Tindak pidana dan pemberantasannya*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Gunakaya. A. Widiada. 1998. *Sejarah dan Konsep Pemasarakatan*. Bandung.
- H.W.R. Wade. 1984. *Administrative Law*. Oxford.
- Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Hartanti Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hartiningsih, Maria. 2011. *Korupsi Yang Memiskinkan*. Jakarta. Kompas.
- Herbert L. Packer. 1968. *The Limits of Criminal Sanction. USA*. Stanford University Press.
- I Dewa Gede Atmadja. 2015. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang. Setara Pers.

- Iqrak Sulhin. 2016. *Diskontinuitas Penologi Punitif*. Jakarta. Prenada Media Group.
- J.J. Rousseau. 1972. *De Contract Social*. Book I, ch. IV. Oxford. Ronald Grimsley.
- Jimly Ashiddiqie. 2003. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Konstitusi Press.
- John Rawls. 2006. *A Theory of Justice, Teori keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung. Alumni Bandung.
- M. Mahfud MD. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta. LP3ES.
- M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya)*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Marbun, Rocky. 2010. *Cerdik dan Praktis Menghadapi Kasus Hukum*. Jakarta. Visimedia.
- Mardjono Reksodiputro. 2007. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta. Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafita.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mohammad Tahir Azhari. 1992. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Bulan Bintang.

- Moeljatno. 1985. *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.
- Muhari Agus Santoso. 2002. *Paradigma Baru Hukum Pidana*. Malang. Averroes Press.
- Muktie Fadjar. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Malang. Bayu Media.
- Muladi dan Barda, Namawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni Bandung.
- Nurul Qamar. 2014. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Padmo Wahjono. 1982. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Poernomo, Bambang. 1994. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta. Liberty.
- Priyatnon Dwitja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.
- Pujiyono. 2017. *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*. Bandung. Mandar Maju.
- R Otje Salman. 1987. *Ikhtiar Filsafat Hukum*. Bandung. Armico.
- R. Soegondo. 2006. *Sistem Pembinaan Napi di Tengah Overload Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*. Yogyakarta. Insania Cita Press.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-pokok Hukum Penintensier Indonesia*. Bandung. Alfabeta.
- Soekanto Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang. Yayasan Sudarto.

- Sujatno, Adi. 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAMRI.
- Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta. Penerbit Kanisius.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung. Widya Padjajaran.
- Zainal Abidin. 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta. Elsam.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang- Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia 1945

Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara nomor 3874) Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Nomor 4150) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tamabahan Lembaran Negara RI Nomor 4250) Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tamabahan Lembaran Negara RI Nomor 4250) Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 (lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN.

Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1995 (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan perubahan ke 2 (dua) atas peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan masyarakat

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, pemebebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

### **C. Tesis, Disertasi, dan Jurnal**

Achmad Surya. 2012. Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Permasyarakatan Klas IIB Sleman. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Amalia Amina Pratiwi. 2017. Sistem Pembinaan Narapidana dalam mewujudkan Pembinaan Berbasis Masyarakat. *Disertasi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Anjari, Warih. 2015. Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Yudisial*. Hlm 38.

Anjari. Penjara Terhadap Dokter Dalam Prespektif Mengikatnya Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pemidanaan Integratif. *Jurnal Yudisial*. Vol. 10 No. 01, April 2017.

Marjane Thermosheizen. 2004. Art, The Concept Rule of Law. *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 3, Tahun II, November. Jakarta.

Widya Puspa Rini Soewarno. 2012. Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak pidana Korupsi Ditinjau Dari Sistem Pamasyarakatan. *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Jurnal Yudisial, 2011, *Simulacra Keadilan*, VOL-IV/NO-03/DESEMBER

#### **D. Sumber Internet**

JAKARTA, (PRLM), “ *Remisi Hanya untuk Koruptor yang Mau Berkolaborasi*” Pikiran [www.pikiran-rakyat.com/node/216519](http://www.pikiran-rakyat.com/node/216519)/Dec 26, 2012. Remisi atau potongan masa hukuman dan pembebasan bersyarat bagi koruptor hanya diberikan kepada mereka yang mau bekerjasama. Diakses minggu 23 maret 2014

<http://www.politikindonesia.com/index.php?k=hukum&i=50627>, diakses, tanggal, 4 September 2021.

Disarikan dari penjelasan Menteri dan Wakil Menteri Hukum dan HAM, pada sejumlah media online ([www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), [www.kompas.com](http://www.kompas.com), [www.detik.com](http://www.detik.com), dan [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)).

#### **E. Surat Kabar**

Saifur Rohman, “Menembus Batas Hukum”, *Harian Kompas*, 22 januari 2010.